

December 2013

Kapitalisme dalam Kerlingan Negara-Berdaulat: Ulasan Historis Singkat dari Era Imperium Romawi Agung sampai Era Neoliberal

Hizkia Yosie Polimpung

Pacivis-Center for Global Civil Society Studies, Universitas Indonesia dan Jaringan Riset Kolektif (JeRK),
yosieprodigy@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

Recommended Citation

Polimpung, Hizkia Yosie (2013) "Kapitalisme dalam Kerlingan Negara-Berdaulat: Ulasan Historis Singkat dari Era Imperium Romawi Agung sampai Era Neoliberal," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 15 : No. 2 , Article 2.

DOI: 10.7454/global.v15i2.32

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol15/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**KAPITALISME DALAM KERLINGAN NEGARA-BERDAULAT: ULASAN
HISTORIS SINGKAT DARI ERA IMPERIUM ROMAWI AGUNG SAMPAI ERA
NEOLIBERAL**

Hizkia Yosie Polimpung

Pacivis-Center for Global Civil Society Studies, Universitas Indonesia dan Jaringan

Riset Kolektif (JeRK)

E-mail: yosieprodigy@gmail.com

Abstrak

Is State in capitalism, as endlessly muttered by Marxists of all stripes, nothing more than just a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie? The article rebuts this by presenting a brief evolution of the constitution of Westphalian sovereign state, one that is still reigning up to present day. It tries to distill the logic of sovereignty and shows how the State is actually operate outside the logic of the capitalism. In so doing, the article also discusses the encounter of these two logics in the liberal conceptions of state (esp. Social Democratic & Neoliberalism) along with its democratic ideology. The main point this article seeks to advance is that it is important to clarify and distinguish the two logics in order to see the inherent incompatibility that forever drives this collaboration towards crisis.

Kata kunci:

Sovereignty, State, capitalism, liberal, neoliberal, governmentality, democracy

Karl Marx dan Friedrich Engels pernah mengatakan bahwa negara tak lebih dari sekadar “komite untuk mengurus seluruh urusan para borjuis.”ⁱⁱ Pernyataan ini cukup problematis dan pertanyaan-pertanyaan sederhana lainnya segera muncul: apa spesialnya negara sehingga para kapitalis membutuhkannya? Mengapa negara dan bukan agama atau bandit (seperti pada Abad Kegelapan sampai Abad Pertengahan) yang dibutuhkan? Jika jawabannya adalah variabel kekuasaan, maka dari mana kekuasaan tersebut didapatkan negara? Jika kekuasaan didapatkan dari para kapitalis, mengapa tidak mereka sendiri yang memerintah karena telah mereka menguasai basis produksi dan kapital?ⁱⁱⁱ Di sinilah pentingnya untuk berpikir sejenak di luar logika kapitalisme (produksi komoditas) ke dalam logika kedaulatan negara.ⁱⁱⁱ Tulisan ini berupaya mengajak pembaca untuk membaca kembali sejarah, melihat perkembangan hubungan negara dan relasi sosial produksi melalui

perspektif negara. Dengan kata lain, tulisan ini akan menunjukkan nampak kapitalisme dalam kerlingan negara berdaulat modern.

Logika Kedaulatan dan Rasio Kepemerintahan

Untuk memahami kapitalisme dari logika kedaulatan, penting bagi kita untuk melihat kedaulatan sebagai suatu gagasan yang non-esensial namun bukan anti-esensial. Hal ini disebabkan karena kapitalisme dapat cocok dengan gagasan, ideologi, maupun agama apa saja, serta presiden atau raja siapa saja asal mengutamakan suatu esensi tertentu.^{iv} Oleh karenanya, memahami kedaulatan tidak dilakukan secara esensial (apa ideologi atau agama yang diusung), maupun nominalis (rezim siapa yang memimpin, apa kelaminnya, dan sebagainya). Kemudian apa yang dipertahankan oleh kedaulatan? Jawabannya tidak lain ada pada kesinambungan eksistensinya sendiri. Dengan meminjam istilah Richard Dawkins, esensi ideologis dan orang-orang (presiden, pemerintah) berfungsi tidak lebih dari suatu *kendaraan* bagi kedaulatan untuk melestarikan dirinya sendiri.

Mungkin, bagi kedaulatan, esensi dan bentuk bersifat sekunder. Namun, tidak demikian adanya. Esensi dan bentuk adalah kebutuhan primer bagi kedaulatan. Kedaulatan harus mengambil bentuk dalam retorika dan aparat negara jika negara tidak ingin punah. Secara lebih spesifik, apa fungsi esensi ini bagi kedaulatan? Sederhana saja, fungsi membenaran dan legitimasi moral bahkan dalam artian yang sangat ekstrem yaitu membenarkan dan melegitimasi menjadi sesuatu yang seolah-olah lazim, normal, dianggap perlu, dan tidak terelakkan.

Lalu, apa fungsi negara dan aparatnya? Keduanya berfungsi sebagai garda depan penjaga sekaligus pengoperasi kedaulatan tersebut. Kedaulatan perlu justifikasi moral universal agar bisa beroperasi melalui, atau lebih tepatnya dioperasikan oleh, para aparat dalam kehidupan sehari-hari. Justifikasi tersebut harus universal agar ia mendapatkan kekuatan metafisiknya sehingga kerja aparat tidak dapat diganggu-gugat.^v Akibatnya, kerja aparat tersebut dalam kehidupan sehari-hari menjadi tidak dipertanyakan lagi. Tepat di sinilah politik yang dilakukan aparatur pemerintah ini tereduksi menjadi sekadar urusan birokratis-manajerial yang monoton dan kaku.

Secara bersama, esensi (justifikasi moral) dan bentuk kongkrit (aparat) membentuk apa yang disebut Foucault sebagai *rasio pemerintahan*. Pada tulisan ini, istilah rasio pemerintahan merujuk pada kesatuan cara pandang dan cara kerja sebetuk entitas dalam

memerintah siapapun atau apapun yang menjadi subjek pemerintahan dan pengaturannya.^{vi} Jadi, apabila apabila rasio pemerintahan berbicara mengenai mekanisme bekerja kekuasaan berdaulat, yaitu: “*the how of power*,” maka logika kedaulatan berbicara mengenai motivasi fundamental dari kekuasaan berdaulat tersebut, yaitu: “*the why of power*.” Memahami kekuasaan sang berdaulat melalui variabel rasio pemerintahan dan variabel logika kedaulatan berimplikasi pada pemahaman tentang kekuasaan itu sendiri, yaitu: bahwa ia memiliki bentuk fisik, dan juga metafisik.

Dengan berfokus pada rasio pemerintahan negara berdaulat, dalam lensa analisis ini, **negara-berdaulat**, apapun bentuknya, apapun ideologinya, siapapun pelaksananya, bangsa apa pun yang menjadi masyarakat/warganya, **tidak lebih dari korelat bagi beroperasinya kedaulatan**. Inilah logika kedaulatan: secara aktif “mengkomodifikasi” ide-ide universal, merekrut orang-orang untuk silih berganti menjadi kendaraannya bagi kesinambungan eksistensi kedaulatan itu sendiri.^{vii} Logika ini mengkonfirmasi temuan Foucault dari studinya tentang genealogi pemerintahan (*governmentality*) abad 16 sampai 20.^{viii} Di situ kita dapat pertama-tama melihat pemerintah (*government*) sebagai sebetuk praktik kekuasaan sang berdaulat atau, dengan kata lain, *sovereignty in action*. Singkatnya, dari Machiavelli sampai Foucault, sekaligus mengulang yang telah disampaikan sebelumnya, hati dan pikiran sang berdaulat tidak akan pernah lepas dari dua hal yang juga *masih belum* berubah, yaitu: (1) mempertahankan, mereplikasi, sekaligus melanggengkan kedaulatannya, dan (2) memerintah, lebih ke arah manajemen dan administrasi, siapapun/apapun yang berada dalam teritori kedaulatannya.

Analogi paling sederhana untuk mengilustrasikan pemerintahan yang lebih bernuansa manajerial ini silakan berpaling pada video permainan The Sims. Di situ jelas saya kira bagaimana kita, sebagai pemain, mengatur seluruh aspek kehidupan aktor-aktor permainan tersebut: mulai dari jam tidur, jam makan, porsi daging-sayuran, jenis susu, waktu berkencan, waktu bercinta, lokasi rumah, lokasi wc-toilet, dst.^{ix} Analogi video permainan lain yang tak kalah serunya adalah game-game strategi perang seperti Warcraft: Defense of the Ancient, Command & Conquer, Rome Total War, dst. Di situ, kita bisa mengatur sebatallion (atau lebih) pasukan, memperlengkapinya dengan senjata tertentu, menaikkannya pada kendaraan perang tertentu, menempatkannya di front tertentu, bahkan mengorbankannya (secara sengaja atau tidak sengaja), dst. Dengan kata lain, dalam permainan tersebut kita meng-atur, me-menej, me-merintah. Bagi kita, aktor-aktor tersebut tak lebih dari sekedar unit-unit yang keberadaannya secara singular tidaklah signifikan. Kita bisa juga memilih pada sisi “baik” atau “jahat.” Kita juga tidak akan pusing jika kita salah mengurus aktor-aktor tersebut. Pula tidak akan kita berkabung jika satu batalion tentara Command & Conquer kita habis dibantai oleh tentara musuh. Sebaliknya, kesatuan kumulatif dari keseluruhan aktor-aktor permainan tersebutlah yang memberikan kita kesuksesan dan kemenangan (kedaulatan?) kita dalam permainan tersebut.

Dalam rasio pemerintahan negara-berdaulat, rakyat tidaklah lebih dari sekumpulan kategori imajiner statistikal yang harus diatur sedemikian rupa (mulai dari tingkat kematian dan kelahiran, tingkat kemiskinan dan daya belinya, taraf pendidikannya, moralitasnya, situs-jejaring yang boleh diakses atau tidak, jenis video yang boleh diunduh atau tidak, bahkan, jika bisa, sampai warna celana dalamnya). Kerinduan, mimpi, aspirasi, dan harapan rakyat hanya dihitung sejauh ia berkontribusi positif bagi kurva kekuasaan dan kekayaan negara sedangkan di luar itu tidak relevan. Hal ini menjelaskan mengapa saat ada prestasi dari aparatnya, pemerintah langsung menggembar-gemborkannya melalui berbagai publisitas dan, sebaliknya, program-programnya yang tidak mencapai target diupayakan sedemikian rupa agar luput dari ekspos publisitas.

Di pemandangan negara, rakyat tampak semata-mata hanyalah seonggok tubuh yang kesehariannya harus diatur, tepat dalam pengaturan keseharian inilah aparat dioperasikan. Tujuannya tidak lain untuk menunjukkan bahwa dalam suatu wilayah ada yang memerintah; ada yang mengatur. Adalah eksistensi dan kesinambungan negara sebagai sang berdaulat yang mengedepan sebagai pertimbangan logis di sini. Memang benar apa yang dikatakan pemikir-pemikir kedaulatan rakyat bahwa jika tidak ada rakyat maka tidak ada negara. Tapi kita harus hati-hati menanggapi hal ini dan jika perlu secara sinis menerjemahkannya sebagai: rakyat adalah unsur penting dan terutama bagi negara karena dan semata-mata hanya karena kepadanya kekuasaan negara bisa dipraktikkan dan ditegakkan. Tanpa ada relasi rakyat-pemerintah, yang telah dan sedang diikat dengan berbagai retorika nasionalisme dan heroisme-patriotik, tidak akan ada kekuasaan berdaulat.

Akibatnya, relasi inilah yang diupayakan untuk dijaga, diatur, diabadikan, dimonumenkan, dirayakan, dan dinormalkan supaya kedaulatan negara bisa terus lestari. Sasaran aparat-aparat pemerintahan, dengan demikian, adalah untuk mengamati, memonitor, membentuk, mengendalikan, dan mengarahkan sikap, opini, perilaku, tindakan, pandangan, bahkan mental dan keyakinan sekelompok rakyat yang menjadi subyek pemerintahannya. Kembali menekankan, bahwa bagaimanapun juga pemerintahan ini memiliki legitimasi berbobot moral, dalam hal ia menjadi acuan universal bagi jalan pemerintahan sebagaimana dipaparkan ini. Hal inilah yang menggoda Colin Gordon untuk menyebut pemerintahan ini sebagai “pemerintahan atas nama kebenaran.”^x

Implikasi dari penjelasan di atas juga panjang. Jika rakyat tidak sejahtera namun negara tersebut masih (merasa) berdaulat maka jangan harap negara akan turun tangan mendengar aspirasi rakyatnya. Jika rakyat menderita kelaparan dan mati karenanya namun negara masih melihat itu tidak mendegenerasi otoritas berdaulatnya maka respon negara tidak akan jauh-jauh dari seputar retorika “saya ikut prihatin.” Jika rakyat marah dan berdemonstrasi karena pemerintah dianggap gagal menyediakan fasilitas dan infrastruktur namun pemerintah masih belum melihat potensi kudeta darinya maka ungkapan lihai dan strategis seperti “terima kasih aspirasinya atau akan kami tindak-lanjuti” adalah upaya paling maksimal yang mungkin diberikan negara. Disebut lihai dan strategis karena dengan mengatakan hal tersebut pemerintah akan dapat menghentikan demonstrasi sekaligus mempertahankan citra demokratis di mata rakyatnya dan dunia dengan membiarkan demonstrasi tersebut dengan dalih klasik “kebebasan berpendapat di alam demokrasi.” Negara tidak akan pernah serius menangani suatu masalah/kasus yang tidak berkorelasi positif bagi kedua tujuannya: keberlangsungan kedaulatan dan legitimasinya memerintah. Singkatnya, negara tidak keberatan jika rakyatnya mati sepanjang mereka tidak mati bersamaan pada waktu yang sama. Negara hanya tidak suka apabila mereka dibunuh oleh negara lain.^{xi}

1000 Tahun Logika Kedaulatan

Sekarang saatnya memainkan argumen ini ke dalam perkembangan historis rasio pemerintahan semenjak Imperium Agung Romawi sampai neoliberalisme hari ini. Perlu ditekankan di awal bahwa adalah mustahil menceritakan evolusi 1000 tahun logika kedaulatan ini sehingga apa yang dilakukan selanjutnya adalah penjabaran ringkasnya. Namun demikian, proses estafet logika kedaulatan dari **berbagai ‘kendaraannya’** (dalam artian Dawkins) dapat dilihat sebagai berikut: kitab suci, Paus & Gereja (Katolik Roma), Kaisar dan Imperium Romawi Agung, Raja dan Pangeran Eropa, Raja negara-berdaulat Modern (Westphalia), negara-berdaulat liberal, negara intervensionis Sosial-Demokrat Keynesian, dan negara neoliberal.

Namun apabila di lihat **dari segi manifestasinya**, maka evolusi kedaulatan ini setidaknya mengalami perubahan setidaknya tiga kali: omnipotensi, teritorialisasi, dan manajerial. Kedaulatan omnipoten ini menggejala pada abad pertengahan, khususnya pasca-

inavasi kaum barbar yang meluluhlantakkan Imperium Romawi lama. Kedaulatan teritorial mulai muncul di masa-masa pencerahan, khususnya pada pemikiran sang Bapak Kedaulatan, Jean Bodin, dan dilegitimasi oleh perjanjian Westphalia (1648), perjanjian Utrecht (1713), Kongres Wina (1814) dimana ia mendapat dimensi teritorial terbatasnya, hingga Konvensi Jenewa (1864, 1906, 1929, 1949) dimana ia diatur oleh hukum internasional. Di Konvensi Montevideo (1933) ia dibakukan sebagai kanon hukum. Kedaulatan manajerial ini muncul sebagai perbaikan bagi kedaulatan teritorial. Ia muncul semenjak Revolusi Inggris, yang mengorbankan Charles I di tiang gantung pada 1649, dan Revolusi Perancis, yang mengorbankan Louis XVI dan keluarganya di Guillotine pada 1793.

Terakhir **dari segi sumbernya**, evolusi kedaulatan berganti sumber basis justifikasi moralnya sedikitnya juga tiga kali: Tuhan, doktrin dua pedang, dan rakyat. Tuhan sebagai sumber kedaulatan jelas menggejala pada abad-abad pertengahan awal. Doktrin dua pedang muncul saat Kaisar Romawi Agung merasa cemburu dengan pedang kedaulatan Paus yang dijustifikasi oleh kedaulatan Tuhan (*divine sovereignty*) dan berniat ikut menikmatinya. Singkat cerita, dibagi-dualah pedang kedaulatan tersebut dimana pedang relijius dipegang Paus yang berkuasa atas kehidupan rohani dan pedang sekuler dipegang kaisar yang berkuasa atas kehidupan politik duniawi. Alhasil, melalui doktrin ini, kaisar dan raja turut menikmati *divine right*. Kedaulatan rakyat muncul saat Revolusi Inggris dan Perancis dan berlanjut sampai setidaknya hari ini dalam bentuk “demokrasi” (penulis maupun pembaca perlu berhati-hati dengan istilah ini). Varian tentu saja ada, namun tetap saja rakyat, terlepas apapun sebutannya, mulai dari umat, kamerad, buruh, *we*, *the people of freedom*, *wong cilik*, sampai, sesederhana, kita, adalah justifikasi bagi pemerintah manapun untuk berkuasa. Mengingat fokus tulisan ini adalah menjelaskan posisi kapitalisme dalam rasio pemerintahan negara, yang notabene baru nampak jelas pada bentuk-bentuk pemerintahan liberal dan setelahnya (yaitu sosial demokrasi dan neoliberal), maka penjelasan mengenai rasio pemerintahan bentuk-bentuk sebelum pemerintahan liberal (Gereja, Imperium, dan Kedaulatan Westphalia) akan dibahas secara singkat.

Gereja, Imperium Romawi Agung dan Kedaulatan Ilahi

Kedaulatan pertama berasal dari citraan tentang Tuhan yang omnipotensi. Citraan ini, yaitu: kedaulatan ilahi, tercetus oleh Santo Agustinus (St. Augustine) di abad 4-5 SM.

Gambaran inilah yang selang enam abad kemudian dipakai oleh Gereja sebagai modalitas politik untuk mengkonsolidasi Eropa pasca-invasi kaum barbar. Gereja merekrut Charlemagne dari Kerajaan Merovingian sebagai Kaisar Romawi Agung untuk membantunya mengkonsolidasi suatu Republik Kristiana (*respublica christiana*). Kedaulatan ilahi yang direpresentasikan oleh Gereja membuat Paus seolah-olah menjadi Tuhan di bumi yang serba disembah dan ditakuti. Namun demikian, hal ini tidak bertahan lama sampai Kaisar Romawi Agung silih berganti berupaya menantang dan meminta bagian dari kekuasaan tersebut. Berbagai krisis akhirnya membuat Paus rela membagi kekuasaannya. Kompromi ini akhirnya melahirkan doktrin dua pedang yang sudah disinggung di atas, dimana pedang ilahi religius dipegang oleh Paus untuk mengatur kehidupan rohaniah sementara pedang sekuler dipegang oleh Kaisar untuk mengatur kehidupan politik duniawi. Sekalipun sekuler, jangan terkecoh karena kekuasaan Kaisar juga bermuatan daya ilahi. Kaisar dan Raja merasa bahwa ia ditunjuk oleh Tuhan untuk memerintah umat manusia, bahkan untuk melakukan penundukan daerah-daerah lain yang “kafir.” Inilah kedaulatan yang dilihat sebagai sumber kekuasaan yang serba tak terbatas. Omnipotensi ini nantinya akan membutuhkan mata para kaisar ini terhadap segala keterbatasannya teknis-operasionalnya, seperti: kemampuan administrasi wilayah, kemampuan memperoleh dukungan rakyat, dan seterusnya.

Lahirnya Negara Modern dan Kedaulatan Westphalia

Masalah omnipotensi kedaulatan ini mulai mengerucut pada operasionalisasinya. Pada karya-karya Jean Bodin ditekankan bahwa kedaulatan sekuler negara harus terdiri dari dua hal, yaitu: wilayah terbatas dan otonomi negara dari intervensi entitas lainnya. Di sini kedaulatan menjelma dari sekadar angan-angan para raja akan kekuasaan yang tidak terbatas menjadi kedaulatan yang membumi. Kedaulatan akhirnya diberikan perangkat operasional untuk praktik sehari-hari. Inilah yang dituju oleh Perdamaian Westphalia tahun 1648 yang mendamaikan Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa. Perdamaian ini berhasil merebut monopoli kedaulatan dari tangan Gereja dan Kaisar Agung ke tangan raja-raja Eropa. Era imperium, baik gereja maupun Romawi, disudahi di meja perjanjian Westphalia.

Perjanjian Westphalia menekankan aspek penting bahwa **negara akan selalu berupa negara-negara** (bentuk plural). Negara tidak dapat, atau setidaknya tidak akan cukup secara

analitis, dipahami sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri dan lepas dari sifat relasionalitas. Kedaulatan Westphalia menekankan relasi antar negara yang ditandai dengan diplomasi modern, perwakilan tetap, dan pengakuan kedaulatan, yang merupakan beberapa korelatnya sehingga adalah mustahil bagi suatu negara berdaulat-modern untuk eksis sendirian. Kedaulatannya justru terjustifikasi dengan keberadaan entitas-entitas berdaulat lainnya. Dengan demikian akan lebih aman melihat negara sebagai *sistem-negara* dan melihat kedaulatan sebagai *sistem-kedaulatan*. Seluruh bentuk hubungan inter-nasional akhirnya didirikan berdasarkan pada basis ini. Tiga bentuk dasar hubungan internasional ini adalah sebuah tritunggal, yaitu: perang, diplomasi, dan dagang.

Negara dan Kedaulatan Liberal

Colbert : “What can I do for you”

Genre : “What can you do for us? Leave us alone (*Laissez-nous faire!*)”^{xii}

Pada Abad Pertengahan, melewati perjanjian Westphalia tahun 1648, sampai di pintu gerbang Revolusi Inggris dan Perancis, basis universalitas kedaulatan memang sempat diisi oleh keilahian relijius (Katolik dan Kristen). Namun setelah Revolusi, universalitas ini tidak lagi valid, apalagi dengan kenyataan merebaknya demokrasi modern.^{xiii} Dari perspektif rasionalitas pemerintahan, desakan revolusioner libertarianisme dan demokratisme merupakan suatu tantangan bagi model pemerintahan saat itu, yaitu: monarki. Bagi pemerintahan ini, masalahnya kemudian adalah bagaimana tetap menjalankan pemerintahan, dan dengan demikian menegakkan kedaulatan, sembari mengakomodasi tuntutan demokrasi dan liberalisme. Atau dengan kata lain, bagaimana mengatur dan memerintah rakyat yang telah terkontaminasi ide-ide liberal dan demokrasi tanpa melanggar aspirasi-aspirasinya. Charles I dan Louis XVI yang merupakan kontainer kedaulatan versi relijius, telah, masing-masing, digantung dan dipenggal karena gagal menjawab tantangan libertarian dan demokratis ini sehingga kedaulatan pun harus “melompat” ke esensi dan bentuk lainnya. Saat itulah ia mengalihkan pandangan ke demokrasi, kapitalisme dan liberalisme. Sintesis kesemuanya dengan kedaulatan melahirkan suatu evolusi mutakhir, setidaknya untuk saat itu, yang disebut “kedaulatan liberal,” lengkap dengan apa yang disebut Foucault sebagai “seni pemerintahan liberal.”^{xiv}

Untuk memahami seni pemerintahan liberal ini, penting kiranya mengambil jalan memutar sejenak untuk melihat lebih detil bagaimana liberalisme masuk dalam kancah

politik di Eropa. Liberalisme merupakan respon memuncaknya absolutisme monarki. Jadi, sekali lagi, ia tidak hadir begitu saja dari dalam; ia dipicu. Seuniversal dan setransenden apapun gagasan yang (dikira) dikandung liberalisme, tetap saja ia butuh prakondisi mendasar untuk memicunya. Berikutnya, respon ini dilakukannya dengan berusaha mengenakan batasan bagi pemerintahan yang ada. Hal ini demikian karena bagi liberal, pemerintah telah selalu “memerintah terlalu banyak” (*govern too much*). Pemerintahan yang eksekutif ini dikhawatirkan, bahkan telah disesalkan, berdampak negatif pada kebebasan individu rakyat untuk mengaktualisasikan diri mereka. Pemerintahan yang eksekutif yang membelenggu aktualisasi individu ini misalnya pada sistem wajib militer, penyeragaman agraria dan industri, dan pajak perumahan yang berlebihan.

Singkat cerita, seri revolusi di Perancis mampu menumbangkan penguasa/pemerintah saat itu dan menggantinya dengan orang-orang baru yang liberal dan demokratis. Namun, logika kedaulatan tetap akan menghantui siapapun yang menduduki tahta pemerintahan, apapun ideologinya dan berapapun banyaknya. Sekali lagi, dalam alam pikir logika kedaulatan, pemerintah bisa saja di kudeta, namun rasionalitas pemerintahan tidak akan bisa tersentuh; pemerintah (orang) tidak akan pernah memiliki kekekalan permanen dengan logika kedaulatan dan rasio pemerintahan. Sintesis antara rasionalitas pemerintahan dan liberalisme kemudian menghasilkan seni pemerintahan liberal. Pemerintahan liberal ini tentu tidak ingin mengulangi pemerintahan monarki yang eksekutif. Namun, inilah tantangannya: bagaimana memerintah tidak secara eksekutif, namun tetap efektif?

Investigasi Foucault mengenai hal ini membawanya pada kesimpulan: natur (*nature*). Adalah natur yang menjadi kata kunci bagi pemerintahan liberal. Natur bukanlah suatu area tertentu yang bebas dari jamahan manusia. Natur adalah sifat alamiah dari masyarakat itu sendiri, yaitu: sebagai individu rasional yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Natur alamiah ini membuat para ekonom seperti Adam Smith menyebut manusia sebagai tidak hanya *homo sapiens* namun juga *homo economicus*. *Homo economicus* adalah manusia alami, manusia rasional, manusia yang “dibutuhkan” pemerintahan liberal. Jelas dilihat bahwa natur, oleh libertarianisme, dipandang dalam koridor ekonomi. Natur inilah yang menjadi sumber kebenaran (*site of truth*) bagi pemerintahan liberal. Kembali mempertimbangkan seloroh Colin Gordon, sekali lagi, kebenaran natur inilah yang diatasnamakan oleh pemerintahan liberal yang,

dengan demikian, pada gilirannya menjustifikasi secara moril keberadaannya sehingga jauh berkebalikan dari anggapan umum bahwa natur adalah zona yang tidak/belum tersentuh kekuasaan manusia, natur dalam kosakata libertarian adalah selalu telah berada dalam kekuasaan manusia, pemerintah liberal. Bahkan, ia ada semata-mata karena pemerintah liberal tersebut.

Lalu bagaimana tepatnya natur ini menyumbang bagi tegaknya pemerintahan liberal? Adalah politik ekonomi (*political economy*) yang digunakan pemerintah untuk menjadikan natur sebagai justifikasi pemerintahannya. Melalui politik ekonomi, pemerintah hadir sebagai administrator untuk menjaga dan mengatur natur tersebut. Obyek pemerintahan ini, yang sekaligus lokus manifestasi natur individu rasional ini, tidak lain adalah pasar. Pasar merupakan lokus dimana mekanisme spontan setiap individu berlangsung. Dalam pasar, setiap individu mempraktikkan (*exert*) rasionalitas mereka. Melalui pasar, terjadi transaksi rasional antara penyuplai (produsen) dan konsumen. Mekanisme pasar yang efektif dan rasional ini, transaksi rasional dan spontanitas individu, hanya akan terjadi apabila pasar dibiarkan bebas. Bebas disini adalah bebas dari intervensi pemerintah (dalam kasus Revolusi Perancis: regulasi monarki Louis). Tepat pada saat inilah logika kedaulatan dan rasio pemerintahan bersinggungan dengan kapitalisme, sistem ekonomi yang berbasiskan pertukaran komoditas dalam dan melalui pasar bebas.^{xv}

Tantangan terhadap rasionalitas pemerintahan pun mencuat. Bagaimana menjaga kebebasan kapitalisme pasar dengan tetap memungkinkan adanya kehadiran pemerintah (intervensi). Di sinilah kecerdikan pemerintahan liberal muncul. **Pemerintah hadir dengan cara menyediakan kondisi bagi kebebasan pasar tersebut.** Pengkondisian kebebasan pasar tersebut dilakukan seperti melalui regulasi yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi agar pasar tetap menjadi pasar bebas, pasar yang rasional, pasar yang di dalamnya mekanisme spontan natural individu berlangsung. Perlu ditekankan di sini bahwa **yang dienggangi oleh liberalisme adalah *intervensi* pemerintah dan bukan *kapabilitas* pemerintah untuk melakukan *intervensi*!** Liberalisme memerlukan negara yang kuat, sedemikian kuatnya untuk menjaga kebebasan pasar dan individu, sedemikian kuatnya untuk mengancam, dalam artian legal-yuridis, siapapun yang berusaha mengkorupsi dan memanipulasi kebebasan pasar tersebut.^{xvi} Bagi liberalisme, pasar yang sah adalah pasar yang berada pada kondisi bebas. Demi menjaga kebebasan kondisi pasar inilah aparat negara,

baik represif maupun ideologis, dikerahkan. **Liberalisme pasar telah dan akan selalu membutuhkan negara! Adalah kekeliruan jika dikira negara mundur/absen dalam liberalisme, negara hanya tidak kelihatan dan negara bertindak/mengintervensi dari jauh (*acting at a distance*).**

Kebebasan pasar ini penting karena hanya pasar yang demikianlah yang mampu menghasilkan profit ganda, bagi penjual dan pembeli. Dengan kata lain, adalah suatu pengayaan bersama (*mutual enrichment*) yang dicoba direalisasikan oleh liberal melalui pasar bebas.^{xvii} Di sini kekayaan orang lain dipahami secara rasional dan bukan altruis. Orang lain penting untuk juga diperkaya karena kekayaannya merupakan faktor penting bagi kekayaan saya. Kaum liberal percaya, dengan menjaga kebebasan maka mekanisme spontan pasar akan membuat para partisipannya kaya.^{xviii} Semakin pasar tersebut ramai, semakin besar kekayaan yang bisa dikeruk. Inilah yang menjadi *rationale* bagi ekspansi pasar bebas untuk keluar dari Eropa. Sampai sini bisa dipahami bahwa globalisasi pasar, yang pertama kali terjadi pada era kolonialisme, terjadi dalam rangka memperluas cakupan pasar bebas ke wilayah non-Eropa dan menjadikannya lebih menguntungkan serta menghasilkan kekayaan bagi partisipannya mula-mula, yaitu: Eropa.

Di sinilah sebenarnya gagasan “kepentingan nasional” muncul untuk pertama kalinya, setidaknya dalam rasio ekonomi. Kepentingan nasional diukur dari kondisi pasar yang kondusif yang tercipta dari hasil upaya pemerintah. Atau, dengan lain kata, kepentingan nasional dilihat dari ada tidaknya pasar bebas. Kata “nasional” tersebut merefleksikan sekumpulan populasi individu yang menjadi subyek bagi setiap regulasi pemerintah, sekumpulan individu yang diantaranya terjadi proses pengayaan bersama melalui pasar. Akibatnya, siapapun yang mengancam mulusnya pasar bebas ini akan menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Pada titik ini pula muncul konsep “keamanan nasional,” setidaknya untuk pertama kalinya dalam rasio ekonomi. Keamanan yang dimaksud adalah keamanan kepentingan nasional. Dengan kata lain, keamanan mekanisme pasar bebas, suatu kondisi yang memungkinkan setiap warga negara melakukan aktivitas ekonomi dengan *bebas*. Implikasi keamanan tidak lain adalah perdamaian sehingga saat keamanan diartikan dalam artian ekonomis maka perdamaian pun akan bernuansa ekonomis pula. Lihat saja apa yang dimungkinkan oleh *perpetual peace*-nya Immanuel Kant:

"Perpetual peace is guaranteed by no less an authority than the great artist [Kunstlerin] Nature herself (natura daedala rerum). The mechanical process of nature visibly exhibits the purposive plan."^{xix}

*"Thus nature wisely separates the nations, although the will of each individual State, even basing its argument on international right, would gladly unite them under its own's Way by force or by cunning. On the other hand, nature also unites nations which the concept of cosmopolitan right would not have protected from violence and war, and does so by means of their mutual self-interest. **For the spirit of commerce sooner or later takes hold of every people, and it cannot exist side by side with war.**"^{xx}*

Terkait kebebasan, penting untuk ditekankan bahwa libertarian menggadang-gadang kebebasan *bukan* demi kebebasan itu sendiri melainkan karena kebebasan itu memberi justifikasi bagi pemerintahan liberal untuk memerintah. Liberalisme tidak berkepentingan dengan kebebasan individu masyarakat melainkan berkepentingan dengan *penyediaan* kebebasan tersebut. Dengan kata lain, kebebasan adalah korelat dari pemerintahan liberal. Kutipan berikut dari Foucault sekiranya memperjelas ini.

*"If I employ the word "liberal," it is first of all because this governmental practice in the process of establishing itself is not satisfied with respecting this or that freedom, with guaranteeing this or that freedom. More profoundly, **it is a consumer of freedom.** It is a consumer of freedom inasmuch as it can only function insofar as a number of freedoms actually exist: freedom of the market, freedom to buy and sell, the free exercise of property rights, freedom of discussion, possible freedom of expression, and so on. The new governmental reason needs freedom therefore, the new art of government consumes freedom. It consumes freedom, which means that it must produce it. It must produce it, it must organize it. The new art of government therefore appears as the management of freedom, not in the sense of the imperative: "be free," with the immediate contradiction that this imperative may contain. **The formula of liberalism is not "be free."** Liberalism formulates simply the following: **I am going to produce what you need to be free. I am going to see to it that you are free to be free.**"^{xxi}*

Sekadar merangkum, bagi **kedaulatan liberal, demokrasi** berfungsi sebagai pembenaran kekuasaan. Tuhan yang tadinya digadang-gadang kini digantikan oleh sekelompok kategori imajiner bernama "rakyat." Jargon yang sangat kita kenal cukup menjelaskan hal ini: *vox populi vox dei*, suara rakyat adalah suara Tuhan. Frasa ini sebaiknya diseriusi dan diartikan secara literer. Saat rakyat, sebagai sekumpulan/kategori rujukan dan bukan individu per individu, menjadi pembenaran "ilahi," maka kedaulatan harus diarahkan untuk memenuhi kesejahteraan dan keamanan rakyatnya.^{xxii} Tapi masalahnya, bagaimana pemerintah, yang kebetulan mendapat giliran memegang kedaulatan, dapat mengetahui bahwa rakyatnya telah sejahtera dan aman atau tidak? Di sinilah **kapitalisme** masuk dan berperan.

Sistem kapitalisme menjanjikan suatu, meminjam diksi Adam Smith, pengayaan bersama (*mutual enrichment*) melalui keuntungan ganda (*dual profit*) dalam perdagangan antara penjual dan pembeli sehingga, logisnya, apabila kapitalisme berjalan lancar maka seluruh rakyat akan sejahtera, bahkan kaya. Syaratnya cuma satu, yaitu: pasar, tempat berlangsungnya perdagangan, harus berada pada kondisi bebas. Di sini doktrin ekonomi-politik liberalisme *laissez-faire* lahir. Pemerintah hadir dengan menyediakan kondisi bagi kebebasan pasar tersebut melalui rupa-rupa regulasi, dan de-regulasi, dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pasar. Intervensi negara mewujud dalam kebijakan non-intervensionis. Pada level ini, negara mungkin akan terlihat tunduk pada mekanisme pasar. Namun, hati-hati, **ketertundukan negara di hadapan mekanisme pasar (dan kelas kapitalis yang mendominasinya) sebenarnya sudah dihitung dalam kalkulasi logika kedaulatan negara.**

Jadi, cukup jelas di sini bahwa keberpihakan negara pada kelas dominan, kapitalis-borjuasi, sampai-sampai seperti yang Marx dan Engels menyebutnya sebagai “komite untuk mengurus seluruh urusan para borjuis,” bukanlah sesuatu yang sifatnya niscaya. Keberpihakan ini merupakan suatu pilihan politis yang secara sadar diambil pemerintah. **Keberpihakan ini masuk dalam penalaran logis kedaulatannya; ia dipakai untuk melanggengkan eksistensi kedaulatannya.**

Intervensionisme Negara dan Ordoliberalisme Model Jerman

“In fact, in [...] Germany, the economy, economic development and economic growth, produces sovereignty; it produces political sovereignty through the institution and institutional game that, precisely, makes this economy work. The economy produces legitimacy for the state that is its guarantor. In other words, the economy creates public law, [...] In contemporary Germany there is a circuit going constantly from the economic institution to the state; and if there is an inverse circuit going from the state to the economic institution, it should not be forgotten that the element that comes first in this kind of siphon is the economic institution. [...] it produces a permanent consensus of all those who may appear as agents within these economic processes, as investors, workers, employers, and trade unions. All these economic partners produce a consensus, which is a political consensus, inasmuch as they accept this economic game of freedom.”^{xxiii}

Pada abad ke-20, tepatnya pasca-NAZI dan Perang Dunia, politik ekonomi liberalisme mulai bermutasi ke arah neoliberal, sekalipun belum seperti neoliberal yang saat ini sedang terjadi. Adalah ordoliberalisme Jerman yang menjadi cikal-bakal neoliberalisme ini. Disebut ordo-liberalisme karena para pemikir yang membidani lahirnya varian

liberalisme ini mempublikasikan ide-idenya melalui jurnal *Ordo*, diluncurkan pada 1936, yang nantinya menjadi terkenal sebagai Mazhab Freiburg di bidang ekonomi politik. Ordoliberalisme memandang bahwa apabila negara hanya menjadi polisi untuk mengatur dan menyediakan iklim bisnis yang baik bagi kapitalisme. Negara akan secara tidak langsung membiarkan mereka yang tidak mendapatkan kue ekonomi. Mereka-mereka ini yang nantinya akan menjadi sumber keresahan sosial, kemiskinan, dan sebagaimana yang dialami Jerman dan menggiring mereka ke NAZI.^{xxiv}

Kembali menggunakan nalar logika kedaulatan, apabila orang-orang yang tidak kebagian kue ekonomi ini terus dibiarkan, konsekuensi ekstrim yang akan di alami pemerintah berdaulat Jerman adalah membawanya kembali kepada perang. Dalam perang, kemungkinan keberlangsungan pemerintah menjadi tidak menentu. Kedaulatan akan berada pada posisi di ujung tanduk. Dari asumsi-asumsi ini, menjadi logis bahwa pemerintah harus aktif membela mereka yang tidak kebagian kue ekonomi untuk bisa tetap sejahtera. Dan memang inilah yang disarankan, dalam rupa klaim akademik, oleh para ordoliberalis: intervensi negara. Program-program ini dioperasionalkan ke dalam setidaknya tiga hal. Pertama, **prinsip manajemen keuangan pemerintah** yang diarahkan untuk menjamin pekerjaan rakyat (*full employment*). Prinsip ini tentu dihitung dalam kalkulasi ekonomi, terutama yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Apabila rakyat bekerja maka mereka mampu membeli dan akhirnya perekonomian jalan. Kedua, **perencanaan ekonomi** yang mencakup perencanaan perimbangan neraca perdagangan negara dan perhitungan statistik demografis. Ketiga, mekanisme *welfaris* untuk melindungi rakyat dari kemiskinan dan resiko-resiko ekonomi. Kebijakan ini di kemudian hari dikenal dengan nama-nama seperti **jaringan pengaman sosial** (*social security net*).

Penyesuaian ordoliberalisme ini oleh pemerintah pada gilirannya menunjukkan perubahan dalam memandang kedaulatan. Kedaulatan tidak lagi sementara ada tidaknya perdagangan bebas melainkan dari ada tidaknya **pertumbuhan dan pembangunan ekonomi** dalam pasar bebas tersebut. Inilah yang mampu menjelaskan kemunculan ekonomi pasar sosial (*social market economy*) yang mulai merambah dimensi-dimensi non-ekonomis seperti: pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Yang dituju dari kebijakan ini adalah tatanan sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat dalam konteks kapitalisme. Inilah mengapa negara dalam preskripsi ordoliberalis adalah **negara kesejahteraan** (*welfare state*).

Negara kesejahteraan adalah negara yang bertugas menjaga mekanisme pasar agar tetap kompetitif, dalam artian mampu menginklusi sebanyak mungkin masyarakat untuk berpartisipasi dan meminimalisir monopoli. Bagi mereka yang tidak mampu akan diberi subsidi dan bagi mereka yang mampu akan dikenakan pajak yang tinggi. Kebijakan-kebijakan sosial akhirnya diarahkan untuk mengantisipasi kebijakan-kebijakan ekonomi.

Implikasi dari rasio pemerintahan ordoliberal, tampak bahwa subyek atau *homo economicus* dalam ordoliberal bukanlah lagi subyek yang terlibat dalam proses pertukaran perdagangan, meskipun ia juga bukan pula seorang konsumeris. *Homo economicus* dalam imajinasi ordoliberalis adalah para produsen. Subyek didorong untuk mampu memproduksi entah sebagai pedagang asongan, *home industry*, perkebunan kecil, kerajinan, atau apa saja sepanjang ia mampu memproduksi dan berpartisipasi pada ekonomi nasional. Kebijakan kredit-kredit usaha kecil-menengah dengan demikian harus diletakkan kemunculannya pada konteks ini.

Namun demikian segera tampak paradoks. Di satu sisi, tradisi ekonomi politik liberal berupaya mengenakan batas kepada kekuasaan negara, membagi-baginya (bedakan dengan trias politika), meletakkannya ke berbagai kontrol, tapi pada ordoliberal, seolah-olah kekuasaan negara dikembalikan ke tahtanya untuk mengatur segala sesuatunya. Kapitalisme, sebagai suatu sistem yang menekankan kebebasan, tanpa intervensi, akan segera berbenturan dengan pemerintahan ordoliberal ini. Krisis ordoliberalisme/ welfarisme ini mulai bermunculan pada tahun 1960-an.

Cukup menarik untuk melihat hal lain di sekitar krisis Ordoliberalisme-Welfarisme dan kemunculan Neoliberalisme Amerika ini, terutama dengan melihat apa yang terjadi di “pabrik produksi” kapitalisme. Di sekitar 1960an-1970an akhir kita melihat di satu sisi krisis welfare capitalism yang salah satu ikonnya ada Kapitalisme Fordis dan sisi lain maraknya keresahan sosial di Eropa. Saat itu buruh yang berangsur meningkat kesejahteraannya, dengan diprovokasi kalangan aktivis-akademik yang juga berangsur meningkat, mulai sadar akan peran vitalnya dalam proses produksi kapitalisme. Kesadaran ini membuat para buruh memperkuat konsolidasi di antara mereka dengan membentuk rupa-rupa serikat buruh dan aliansi pekerja(-mahasiswa) untuk kemudian menggugat eksploitasi para kapitalis yang mempekerjakan mereka. Alhasil di sana-sini terjadi protes, demonstrasi, dan pemogokan (tidak sedikit pula pengrusakan). Tepat saat inilah kapitalisme meminta pertolongan negara untuk mengeluarkannya dari krisis. Logika kedaulatan kembali bekerja, apabila krisis ini tidak kunjung berakhir, maka ekonomi negara akan kolaps, keresahan akan merembet sampai menjadi perang sipil, dan status quo kedaulatan menjadi taruhannya. Maka terjadilah yang terkenal disebut sebagai—dalam berbagai sebutannya—“the historic compromise,” yaitu saat pemerintah, apapun ideologinya—kiri, tengah, kanan—di Eropa berpihak pada kapitalis dan berbalik mengopresi demonstrasi buruh-mahasiswa. Alhasil singkat cerita serikat buruh dibubarkan di mana-mana, organisasi mahasiswa banyak yang dilarang, eksponen-eksponen pergerakan ditangkap (jika bukan diculik atau dibunuh). Di sisi kebijakan pun segera dilakukan “penyesuaian”: berbagai kebijakan seperti buruh kontrak,

outsource, pemudahan relokasi industri, fleksibilisasi dan spesialisasi pekerjaan bermunculan. Globalisasi ekonomi pun menjadi hal yang tak terelakkan lagi demi memfasilitasi ini semua: relokasi industri, investasi asing, perpindahan buruh-buruh murah dari Asia-Afrika, dst.. Hal ini keseluruhannya ditujukan untuk menaklukkan, menjinakkan dan akhirnya menundukkan para buruh kembali ke kekuasaan kapitalis. Negara, dengan kedaulatannya, berperan penting dalam krisis ini untuk mengembalikan kekuasaan kelas dominan. Inilah neoliberalisme.

Negara Neoliberal, Mazhab Chicago dan *Homo Economicus*

Apabila diamati lebih seksama, akan nampak suatu paradoks di sini: untuk menjaga kebebasan pasar maka pemerintah harus melakukan pembatasan-pembatasan berupa regulasi, legislasi, dan peraturan. Politik keamanan dilakukan dengan menciptakan hukum-hukum yang interventif. Aparat pemerintah disebar sedemikian rupa sampai mengepung masyarakat. Sampai titik tertentu, paradoks ini berakibat pada kembalinya opresi a la monarki Abad Pertengahan ke kehidupan modern. Hanya saja, kali ini mengambil rupa rezim-rezim Sosialis Terpimpin atau bahkan Fasisme/Nazisme. Inilah krisis rasionalitas pemerintahan liberal. Keinginannya untuk menjaga kebebasan (pasar) justru berakibat pada pembatasan kebebasan itu sendiri.^{xxv} Jawaban terhadap tantangan krisis inilah yang membuat liberalisme berevolusi menjadi *neoliberalisme*.

Munculnya neoliberalisme setidaknya ditandai dengan manuver dari empat figur pada tahun 1978-80, yaitu: (1) kebijakan kapitalisasi Cina oleh Deng Xiao Ping pada 1978, (2) tangan besi Margaret Thatcher dalam menekan serikat buruh pada Mei 1979, (3) kebijakan kurs mengambang Paul Volcker, Presiden Bank Sentral AS (The FED), pada Juli 1979, dan (4) dukungan presiden AS, Ronald Reagan, terhadap kebijakan Volcker ditambah dengan kebijakannya untuk mengekang serikat buruh, menderegulasi industri, dan, yang paling terkenal, menabuh gong bagi era kapitalisme finansial. Setidaknya keempat preseden ini menjadi sumbu bagi gelombang neoliberalisasi di belahan dunia lainnya, yang tentunya bukan menjadi kompetensi studi ini untuk memaparkan.^{xxvi}

Ciri khas neoliberalisme, terutama dalam varian Mazhab Chicago, seperti Gary Becker dan Theodore Schultz, apabila diabstraksikan dari fenomena-fenomena neoliberalisasi pada tahun-tahun tersebut (sampai hari ini) tampak pada gesturnya dalam **“men-demokratisasi-kan” logika ekonomi kapitalisme**. Yang dimaksud dengan demokratisasi ini adalah suatu upaya untuk menyebarluaskan logika ekonomi ke seluruh lapisan/elemen masyarakat dari yang tadinya hanya terpusat pada para kapitalis, pemerintah,

dan pimpinan-pimpinan perusahaan. Tidak hanya itu, neoliberalisme berupaya memperluas cakupan logika ekonomi kapitalis ke domain-domain yang tadinya bukan ekonomi seperti: pendidikan, kesehatan, seni, kebudayaan, hiburan, dan yang menjadi sorotan studi ini, politik.

Gestur neoliberalisasi ini tidak seharusnya dilihat dalam kaitannya dengan kebijakan dan (de)regulasi pemerintahan semata. Jauh lebih mendalam, gestur ini mencapai pada apa yang disebut Foucault dengan produksi *homo economicus* sebagai subyek neoliberal. Produksi subyek neoliberal ini dilakukan sedemikian rupa untuk mengubah masyarakatnya menjadi masyarakat yang dengan sendirinya akan menjaga rasionalitas dan kebebasan pasar. Hal ini akan meringankan tugas pemerintah dalam menjaga distorsi dan manipulasi mekanisme pasar. Hal ini dilakukan karena *homo economicus* adalah subyek yang bertindak rasional dan setiap upayanya ditujukan untuk menjaga sistem yang darinya ia memperoleh kenyamanan ekonomis. Dengan kata lain, dengan neoliberalisasi, libertarian berusaha menyebarluaskan rasa kepemilikan sistem (ekonomi kapitalis) kepada seluruh elemen masyarakat. Hal ini dilakukan dengan selalu menyuntikkan jargon-jargon yang mengesankan bahwa sistem inilah satu-satunya jalan untuk mencapai kemakmuran. Tidak kebetulan pula bahwa salah satu jargon Thatcher adalah TINA—*there is no alternative*.

Upaya untuk memerintah (*govern*), yang tadinya hanya berdimensi legal-institusional, kini bertransformasi dengan mulai merambah ranah-ranah mental.^{xxvii} Apabila sebelumnya pemerintah memerintah dengan cara mengatur regulasi, aturan, dan institusi, kini bertambah yang diaturnya, yaitu “jalan hidup” masyarakatnya. Pemerintah, melalui berbagai aparatnya, terus menyampaikan himbauan, iklan layanan masyarakat, petuah, dan nasihat kepada masyarakatnya yang secara tidak langsung mengarahkan masyarakatnya untuk menjawab tantangan sistem ketimbang mempertanyakannya. Proliferasi buku-buku motivasi, beserta sekumpulan organisasi dan nabi-nabi motivator bermunculan untuk ikut meneguhkan arah “jalan hidup” masyarakat. Dan yang terpenting, semua ini berjalan dengan spontan! Titik inilah yang dituju oleh pemerintahan neoliberal saat pengaturan pemerintah telah menjadi swa-pengaturan (yang berkedok swa-bantu, *self-help*) masyarakat itu sendiri. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan subyek-subyek yang dapat menjaga kelanggengan sistem tersebut, atau para *homo economicus*. Dengan kata lain, pemerintahan neoliberal mengarahkan para pelaksananya untuk melakukan intervensi di taraf lingkungan, sedemikian rupa sehingga lingkungan ini yang mengkondisikan

langgengnya kapitalisme. Melalui neoliberalisme inilah kita saksikan pergeseran rasio pemerintahan (*governmentality*) menjadi rasio kelingkungan (*environmentality*), yaitu pemerintahan yang memodifikasi lingkungan, tidak hanya lingkungan politik, melainkan juga lingkungan sosial, kultural, bahkan geografis (misalkan tata kota).

Hal yang menarik untuk diperhatikan di sini adalah posisi subyek, atau *homo economicus*, yang kembali bergeser. Sebelumnya, posisi *homo economicus* pada pemerintahan liberal hanyalah sebagai subyek pertukaran dagang, pada ordoliberal ia adalah subyek produksi, dan pada neoliberal Amerika ini *homo economicus* menjadi subyek investasi dan subyek enterpreneurial.^{xxviii} Dalam neoliberalisme, adalah kehidupan subyek itu sendiri yang terneoliberalisasi dan tereduksi pada aspek-aspek ekonomi seperti: melihat sekolah, pertemanan, pacaran, istirahat, rekreasi dan hampir segala sesuatunya dalam terma “investasi.” Subyek *homo economicus* yang demikianlah yang menjadi penjaga-penjaga sistem kapitalisme itu sendiri tanpa perlu campur tangan negara. Dengan melihat dirinya sebagai “*human capital*,” sebagaimana salah satu teori Gary Becker, subyek akan menyesuaikan dan mendisiplinkan dirinya sedemikian rupa untuk berkonformasi dengan sistem yang ada, yaitu kapitalisme. Proses penyesuaian diri ini yang diperhitungkan oleh Becker melalui teori pilihan rasional individunya.^{xxix} Begitu pula dalam memandang dirinya sendiri dalam relasinya dengan kerja. Semenjak *homo economicus* neoliberal melihat kerja sebagai suatu bentuk investasi maka tidak lagi ia melihat pekerjaan sebagai suatu yang alienatif. Subyek neoliberal akan melihat pekerjaannya sebagai karir hidupnya, bahkan sebagai identitasnya! Inilah bentuk subyek yang kemunculannya dikondisikan dan terus dikondisikan reproduksinya oleh pemerintahan neoliberal. Logika kedaulatan neoliberal, akhirnya tidak akan berjalan tanpa ditopang oleh subyek-subyek demikian. Kedaulatan rakyat? Ya! Inilah “kedaulatan rakyat” yang menjadi pelegitimasi kedaulatan neoliberal.

Penutup: Relasi Negara-Berdaulat dengan Kapitalisme

Dari uraian singkat ini terlihat bahwa relasi antara negara-berdaulat dengan kapitalisme tidak pernah stabil. Keduanya saling membutuhkan namun sekaligus saling menafikan. Dialektika di antara keduanya pun tidak menentu. Di satu saat negara memimpin, di saat lain negara mundur dan kapitalisme berkuasa. Apapun hubungan di antara keduanya, satu hal yang pasti, tatanan dunia berganti-ganti wajah mengikuti kelindan di antara

keduanya. Pelajaran yang penting dalam menganalisis kapitalisme dalam kaitannya dengan peran negara adalah menyadari bahwa keduanya memiliki logikanya masing-masing, yang relatif otonom satu sama lain, dan bahwa kedua logika tersebut tidaklah kompatibel satu terhadap yang lainnya. Bagi negara, kapitalisme adalah alat untuknya menyejahterakan masyarakat, yang pada gilirannya, berperan sangat signifikan bagi transfer legitimasi bagi kekuasaan negara tersebut. Sebaliknya, dari pandangan kapitalisme, negara adalah semata-mata polisi dan fasilitator pasar untuk senantiasa mengamankan dan menjaga sirkulasi di dalamnya, dan juga siap sedia melakukan *bail-out* jika terjadi krisis, agar proses ekspansi komodifikasi dan komersialisasi segalanya demi akumulasi kapital dapat berjalan dengan aman dan sentosa. Dua logika inilah yang inkompatibel. Logika kedaulatan negara bersifat sentripetal, mengarah pada konsolidasi kekuasaannya sendiri, sementara logika pasar kapitalisme adalah sentrifugal, mengarah keluar dan berusaha menjangkau zona-zona yang tadinya di luar ekonomi untuk ditundukan dalam proses komodifikasi dan akumulasi kapital. Jadi, sampai titik tertentu, apabila proses akumulasi kapital sudah mulai merundung kedaulatan, negara akan turun mengintervensi. Begitu pula sebaliknya, saat konsolidasi kedaulatan negara sudah semakin mengkristal, para kapitalis akan mengganggu ekonomi nasional (relokasi industri, melarikan modal, dan seterusnya). Inkompatibilitas inilah yang menjadi titik kontradiksi internal negara liberal, yang membuatnya akan terus-menerus krisis, yang akan terus-menerus membuatnya berevolusi ke bentuk-bentuk berikutnya. Dan tentu saja dalam krisis tersebut, dalam masa-masa saat benturan kontradiksi negara-kapitalisme sudah tak tertahankan, rakyat akan selalu terhimpit, tergecet, terkorbankan, baik atas nama kepentingan nasional (jargon negara), maupun kesejahteraan bersama (jargon kapitalisme).

Daftar Pustaka

- “Manifesto Komunis dan Teori Negara.” *IndoPROGRESS*, Agustus 2011.
- Arrighi, Giovanni (2007). *Adam Smith in Beijing*. London: Verso.
- Becker, Gary Becker (1992). *The Economic Way of Seeing at Life*. Kuliah Nobel, 9 Desember 1992.
- Bosteels, Bruno (2005). “Post-Maoism: Badiou and Politics,” *Positions*, Vol. 13, No. 3.
- Bull, Malcolm (tt). Komentar terhadap buku *State of Exception* karya Giorgio Agamben. <http://www.generation-online.org/p/fpagamben2.htm>.
- Derrida, Jacques (2005). *Rogue: Two Essays on Reason*, terj. P.-A. Brault dan M. Naas. Stanford: Stanford Uni Press.

- Derrida, Jacques (2002). *“Force of Law: The ‘Mystical Foundation of Authority’*,” terj. M. Quaintance. J. Derrida, *Acts of Religion*, peny. G. Anidjar. New York dan London: Routledge.
- Foucault, Michel (1990). *The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction*. New York: Vintage Books.
- Foucault, Michel (2003). *Society Must be Defended*. New York: Picador.
- Foucault, Michel (2007). *Security, Territory, Population*. New York: Palgrave Macmillan.
- Foucault, Michel (2008). *The Birth of Bipolitics*. New York: Picador.
- Gordon, Colin (1991). “Governmental Rationality: An Introduction.” G. Burchell, C. Gordon dan P. Miller (peny.). *The Foucault Effect*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Hardt, Michael Hardt dan Negri, Antonio (2009). *Commonwealth*. Cambridge, Mass.: Belknap Press.
- Harvey, David (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford Uni Press.
- Kant, Immanuel (1970). “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch,” terj., H.B. Nisbet. H.Reiss, peny. *Kant's Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lacher, Hannes (2006). *Beyond Globalization: Capitalism, Territoriality and the International Relations of Modernity*. New York: Routledge.
- Lefort, Claude (1988). *Democracy and Political Theory*. Oxford: Polity Press.
- Marx, Karl (1973). *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy*, terj. M. Nicolaus. London: Penguin Books.
- Marx, Karl dan Engels, Friedrich (1996). *The Communist Manifesto, with Introduction by David Harvey*. London: Pluto Press.
- Mouffe, Chantal (2000). *The Democratic Paradox*. London: Verso.
- Polimpung, Hizkia Yosie (2011). *Republikanisme, Hantu Kedaulatan dan Primasi Perlawanan Demokratis*. Makalah disajikan pada forum “Republikanisme sebagai Paradigma Pikir Kewargaan yang baik” dan bedah buku *Republikanisme dan Keindonesiaan* karya Robertus Robet, Citizens Institute, Universitas Negeri Jakarta, 16 Maret 2011; diterbitkan dengan judul yang sama pada *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1, Juni 2011.
- Rose, Nikolas dan Miler, Peter (1992). “Political Power beyond the State: Problematics of Government.” *British Journal of Sociology*, Vol. 43, No. 2.
- Schmitt, Carl (1985). *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, terj. G. Schwab. Cambridge: The MIT Press.
- Schultz, Theodore W. (1971). *Investment in Human Capital: The Role of Education and Research*. New York: The Free Press.
- Wood, Ellen Meiksins (1991). *The Pristine Culture of Capitalism: A Historical Essay on Old Regimes and Modern States*. London: Verso.

Catatan Belakang

ⁱ “[T]he modern State is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie.” Karl Marx dan Friedrich Engels, *The Communist Manifesto, with Introduction by David Harvey*, London: Pluto Press, hal. 36.

ⁱⁱ Sepanjang studi saya tentang kedaulatan dan kenegaraan, pertanyaan-pertanyaan inilah yang tidak tersentuh oleh para Marxis semenjak Marx, itupun jika menganggap klaim Marx sendiri bahwa ia bukanlah Marxis adalah guyonan, Vladimir Lenin, Antonio Gramsci, Louis Althusser, Ralph Miliband, Nicos Poulantzas, Immanuel Wallerstein, Bob Jessop, Samir Amin, Justin Rosenberg, David Harvey, Antonio Negri, Michael Hardt, sampai Slavoj Zizek. Coba saja cari jawaban ini juga pada ulasan teori negara Marxian dalam tulisan Anto Sangaji, “Manifesto Komunis dan Teori Negara,” *IndoPROGRESS*, Agustus 2011. Pengecualian ada pada, sejauh yang saya temukan, Ellen Meiksins Wood, *The Pristine Culture of Capitalism: A Historical Essay on Old Regimes and Modern States*, London: Verso, 1991 dan Hannes Lacher, *Beyond Globalization: Capitalism, Territoriality and the International Relations of Modernity*, New York: Routledge, 2006. Namun demikian, keduanya masih tetap gagal memahami negara berdaulat *in its own term*.

ⁱⁱⁱ Problem ini sebenarnya telah disadari oleh Lenin, lalu Mao sampai Althusser dan Poulantzas melalui apa yang mereka sebut sebagai ‘otonomi relatif’ (secara filosofis, supra-struktur terhadap basis-struktur; secara ekonomi politis, negara terhadap relasi sosial produksi). Namun menurut hemat penulis, keempatnya masih belum mampu menyelesaikan problem ini. Perkembangan mutakhir perdebatan ini ada pada Michael Hardt dan Antonio Negri, *Commonwealth*, Cambridge, Mass.: Belknap Press, bab 6.3, terutama diskusi tentang ‘political diagonal’. Lihat juga uraian cemerlang Bruno Bosteels, “Post-Maoism: Badiou and Politics,” *Positions*, Vol. 13, No. 3, 2005. Sekalipun mampu memberikan landasan ontologis filosofis bagi otonomi relatif ini, sayangnya uraian kongkrit historis, terutama tentang negara berdaulat itu sendiri, masih absen.

^{iv} Saya tidak memiliki cukup ruang di sini untuk mengelaborasi klaim ini. Namun demikian, saya mengelaborasinya dengan konsep **hantu kedaulatan**, suatu daya tak terlihat yang senantiasa menanti dan akan selalu “membelokkan” seluruh agenda non-kedaulatan yang diusung siapa pun yang menempati tahta kedaulatan tersebut, dalam Hizkia Yosie Polimpung, “Republikanisme, Hantu Kedaulatan dan Primasi Perlawanan Demokratis, makalah disajikan pada forum “Republikanisme sebagai Paradigma Pikir Kewargaan yang baik” dan bedah buku *Republikanisme dan Keindonesiaan* karya Robertus Robet, Citizens Institute, Universitas Negeri Jakarta, 16 Maret 2011; diterbitkan dengan judul yang sama pada *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1, Juni 2011.

^v Elaborasi tentang kekuatan (*force*) metafisik ini bisa dilihat di Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, terj. G. Schwab, Cambridge: The MIT Press, 1985; Jacques Derrida, *Rogue: Two Essays on Reason*, terj. P.-A. Brault dan M. Naas, Stanford: Stanford Uni Press, 2005; Jacques Derrida, “Force of Law: The ‘Mystical Foundation of Authority’,” terj. M. Quaintance, dalam J. Derrida, *Acts of Religion*, peny. G. Anidjar, New York dan London: Routledge, 2002.

^{vi} Colin Gordon, “Governmental Rationality: An Introduction,” dalam G. Burchell, C. Gordon, dan P. Miller (peny.), *The Foucault Effect*, Chicago: The University of Chicago Press, 1991. Foucault, dalam *Birth of Biopolitics*, secara silih berganti menggunakan istilah “rasionalitas politik,” “rasionalitas pemerintahan,” atau bahkan hanya “pemerintahan,” untuk merujuk pada gagasan yang sama. Analisis yang lebih mendetil dan sistematis mengenai komponen-komponen rasio pemerintahan, yang akan sangat berguna bagi studi empirik mengenai tema rasio pemerintahan lihat Nikolas Rose dan Peter Miller, “Political Power beyond the State: Problematics of Government,” dalam *British Journal of Sociology*, Vol. 43, No. 2, 1992.

^{vii} Kata “komodifikasi” dipakai di sini dengan kesadaran penuh. Kata dasar “komodifikasi” adalah “komoditas.” Analogi ini berlaku pula bagi gagasan-gagasan universal yang silih-berganti digadang-gadang oleh negara-berdaulat: perdamaian universal, persaudaran krisetn, demokrasi, sosialisme, komunisme, fasisme, kebangsaan, islamisme, dst. Sama seperti komoditas, gagasan-gagasan ini dipertukarkan kepada para masyarakat (nb: bayangkan *scene* kontrak sosial) untuk akumulasi legitimasi dan penyerahan kedaulatan mereka untuk diatur (dan bukan sebaliknya: berontak).

^{viii} Sebenarnya bisa dilihat sedari *The History of Sexuality vol I*, namun akan tampak lebih culas pada seri-seri kuliahnya yang baru-baru ini diterbitkan satu per satu. Tiga di antaranya yang paling relevan: *Society Must Be Defended* (2003), *Security, Territory, Population* (2007), *The Birth of Biopolitics* (2008).

^{ix} Secara psikoanalitis, permainan ini sangat laris bisa jadi karena ia mampu menawarkan fantasi *pervert* dimana pemainnya bisa memainkan peran seperti tuhan: serba-mengatur kehidupan.

^x Colin Gordon, “Governmental Rationality: An Introduction,” hal. 8.

-
- ^{xi} Menyitir Malcolm Bull saat mengomentari buku *State of Exception* Giorgio Agamben. [dapat diakses di <http://www.generation-online.org/p/fpagamben2.htm>].
- ^{xii} Dialog ini terjadi pada 1680 antara Jean-Baptiste Colbert, Menteri Keuangan Perancis pada masa tersebut dengan Joel Le Gendre, perwakilan para pebisnis Perancis saat itu. Dikutip dari Foucault, *The Birth of Biopolitics*, hal. 20.
- ^{xiii} Untuk pembahasan mengenai merebaknya demokrasi modern ini, ada baiknya memperhatikan sebagaimana yang dipaparkan oleh Claude Lefort, *Democracy and Political Theory*, Oxford: Polity Press, 1988, dan Chantal Mouffe, *The Democratic Paradox*, London: Verso, 2000.
- ^{xiv} Foucault, *The Birth of Biopolitics*
- ^{xv} Perbedaan trivial di sini sekiranya penting, semenjak kerap kali disamakan antara kapitalisme dan liberalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi berbasis pasar, sementara liberalisme yang dikaitkan dengan kapitalisme ini merupakan suatu sistem politik ekonomi yang berbicara tentang hubungan negara yang selalu mendukung pasar, bukan demi pasar itu sendiri, melainkan demi kesinambungan legitimasi pemerintahannya. Kebebasan pasar, akhirnya adalah *raison d'être* sekaligus *conditio sine qua non* bagi negara yang menerapkan politik ekonomi liberal (dan variannya).
- ^{xvi} David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, New York: Oxford Uni Press, 2005.
- ^{xvii} Dalam *The Wealth of Nation*, Adam Smith mendetilkkan penjelasan ini dengan mekanisme tangan tak terlihat (*invisible hand*).
- ^{xviii} Orang-orang yang dibicarakan disini tentunya adalah orang-orang yang, terutama, memiliki modal.
- ^{xix} Immanuel Kant, "Perpetual Peace: A Philosophical Sketch," terj., H.B. Nisbet, dalam H.Reiss, peny., *Kant's Political Writings*, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, hal. 108.
- ^{xx} *Ibid.*, hal. 114. Cetak tebal penekanan penulis.
- ^{xxi} Foucault, *The Birth of Biopolitics*, hal. 63, cetak tebal dari penulis.
- ^{xxii} Persis seperti teori-teori klasik (Thomas Hobbes, John Locke) tentang fungsi negara.
- ^{xxiii} Foucault, Michel, *The Birth of Biopolitics*, hal. 84.
- ^{xxiv} Hitler muncul sebagai representasi keresahan rakyat Jerman terhadap krisis ekonomi pasca malaise ekonomi 1930 dan Perang Dunia I).
- ^{xxv} Pemaparan ini juga pada gilirannya mempertanyakan penjelasan rasis tentang kemunculan Nazisme Hitler yang selalu menekankan faktor-faktor identitas kultural. Jauh dari itu, Fasisme merupakan capaian ekstrim dari liberalisme! Hal serupa hari-hari ini dapat disaksikan pada tuduhan kepada pemerintah AS yang liberal sebagai sosialisme terselubung akibat keputusannya memberi *bailout* yang sangat besar saat krisis finansial 2008-9 kemarin.
- ^{xxvi} Uraian ekstensif dapat dilihat dari David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, dan Giovanni Arrighi, *Adam Smith in Beijing*, London: Verso, 2007.
- ^{xxvii} Marx pernah menyitir ini bahwa suatu saat, kapitalisme akan tegak dengan sendirinya saat mental umum (*general intellect*) kapitalis sudah "diidap" oleh seluruh elemen masyarakat. Karl Marx, *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy*, terj. M. Nicolaus, London: Penguin Books, 1973, hal. 706.
- ^{xxviii} Lihat Theodore W. Schultz, *Investment in Human Capital: The Role of Education and Research*, New York: The Free Press, 1971.
- ^{xxix} Gary Becker, *The Economic Way of Seeing at Life*, Kuliah Nobel, 9 Desember 1992.